

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI
UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010-2014**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :
Novita Dwi Astuti
15812147004

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI
UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010-2014**

SKRIPSI

Oleh
NOVITA DWI ASTUTI
15812147004



Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 6 Juli 2017
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui
Dosen Pembimbing



Isroah, M.Si
NIP. 19660704 199203 2 003

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010-2014

Oleh:
Novita Dwi Astuti
15812147004

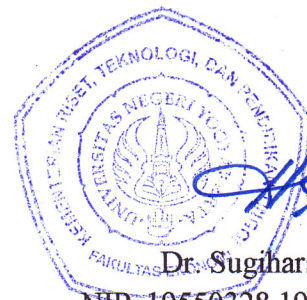
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Juli 2017 dan dinyatakan telah lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dyah Setyorini, S.E., M.Si., Ak.	Ketua Penguji		3/8/2017
Isroah, MSi.	Sekretaris Penguji		3/8/2017
Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si.	Penguji Utama		28/7/2017

Yogyakarta, 7 Agustus 2017

Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si.
NIP. 19550328 198303 1 0028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Dwi Astuti

NIM : 15812147004

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri.

Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat orang yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 27 Juli 2017

Penulis,



Novita Dwi Astuti

NIM. 15812147004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1. “Karena sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-Mulah kamu berharap” (Q.S Al-Insyirah: 6-8)
2. “Allah selalu member yang terbaik bagi hamba-Nya Cukup Allah sebagai penolongkami dan Dia adalah sebaik-baiknya pelindung (D.S Ali Imran: 173)
3. “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmusesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar” (Q.S Al-Baqarah: 153).

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan Puji Syuur Kehadirat Allah SWT, Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua, Bapak Mudjidjono dan Ibu Warsiti yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan serta cinta kasih yang tiada terhingga;
2. Kakakku Nur Andytya Setyawan atas dukungan dan doa;
3. Bapak dan Ibu dosen Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan pendidikan dengan sabar selama kuliah

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI
UMUM (DAU) TERHADAP BELAJA MODAL PADA KABUPATEN DAN
KOTA DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010-2014**

Oleh :
NOVITA DWI ASTUTI
15812147004

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014, 2) Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja modal pada Kabupaten/Kota pada Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014, 3) Mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014 yang berjumlah 10 kabupaten/kota. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis menggunakan regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1)Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,279, koefisien regresi sebesar 0,587, koefisien determinasi (r^2) 0,078;2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r) bernilai positif sebesar 0,426, koefisien regresi sebesar 0,155, koefisien determinasi 0,181; 3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan koefisien korelasi (R) sebesar 0,476, koefisien determinasi sebesar 0,227.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Moda

INFLUENCE OF REAL EARNING INCOME (PAD), AND GENERAL ALLOCATION FUND (DAU) to CAPITAL EXPENDITURE IN REGENCY/CITY IN BENGKULU PROVINCE at 2010-2014

By:
NOVITA DWI ASTUTI
15812147004

ABSTRACT

This study aims to: 1) Know the influence of real earning income (PAD) to the Capital Expenditure in Districts in Cities in Bengkulu Province at 2010-2014, 2) To know the effect of General Allocation Fund (DAU) to Capital Expenditure in Regency and City in Bengkulu Province at 2010-2014, 3) Know the influence of real earning income (PAD) and General Allocation Fund (DAU) to Capital Expenditure in Regency and City in Bengkulu Province at 2010-2014.

Population in this research were all Regency and City in Bengkulu Province at 2010-2014 which amounted 10 regency and city. collecting data Technique in this study were documentation method. Prerequisite test of data analysis used multicollinearity test, heteroskedasticity test, and autocorrelation test. Hypothesis test used simple linear regression and multiple linear regression analysis.

The results showed that: 1) Local real earning income (PAD) had positive influence to Capital Expenditure. This was indicated by the value of correlation coefficient (r) of 0,279, regression coefficient 0,587, determination coefficient 0,078; 2) General Allocation Fund (DAU) had a positive influence to Capital Expenditure, indicated by positive value of correlation coefficient (r) of 0.426, regression coefficient 0,155, determination coefficient 0,181; 3) Real Earning Income (PAD) and General Allocation Fund (DAU) simultaneously had a positive influence on Capital Expenditure, shown by the correlation coefficient (R) of 0,476, determination coefficient 0,227.

Keywords: local real earning income (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Capital Expenditure.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunian-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014. Tugas akhir ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih atas bimbingan, saran dan nasehat yang diberikan selama melaksanakan Tugas Akhir kepada:

1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Rr. Indah Mustikawati, S.E., M.Si., Ak., Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta;
4. Dr. Denies Priantinah, S.E., M.Si., Ak., CA., Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Isroah, M.Si., Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyusun tugas akhir skripsi;
6. Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si., Dosen Narasumber yang banyak membantu dan memberikan saran dalam penyusunan tugas akhir skripsi;

7. Segenap Dosen Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu;
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan selama penyusunan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap laporan ini dapat berguna dan bermanfaat khususnya untuk penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 27 Juli 2017

Penyusun



Novita Dwi Astuti

Nim: 15812147004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS.....	14
A. Kajian Teori.....	14
1. Belanja Modal.....	14
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	18
3. Dana Alokasi Umum (DAU).....	26
B. Penelitian yang Relevan.....	29
C. Kerangka Berfikir.....	33
D. Paradigma Penelitian.....	36
E. Hipotesis.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Desain Penelitian.....	38
B. Populasi.....	38
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	38
1. Variabel Dependen (Terikat).....	39
2. Variabel Independen (Variabel bebas).....	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	40

E. Teknik Analisis Data	40
1. Statistik Deskriptif	40
2. Uji Asumsi Klasik.....	41
3. Uji Hipotesis	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian.....	47
1. Deskripsi Data Penelitian	47
2. Statistik Deskriptif	48
3. Analisis Data	50
4. Pengujian Hipotesis	53
B. Pembahasan.....	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Formulasi Untuk Menghitung Besarnya DAU Berdasarkan Pendapatan APBN	29
2. Prosedur Penentuan Data	48
3. Rangkuman Data Khusus	49
4. Uji Multikolinieritas	52
5. Hasil Uji Autokorelasi	53
6. Hasil Uji Linier Regresi Linier Sederhana Pendapatan Asli Daerah (PAD)	54
7. Hasil Uji Linier Regresi Linier Sederhana Dana Alokasi Umum (DAU)	56
8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Paradigma Penelitian	36
2. Uji Heteroskedastisitas Dengan P-Plot	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	70
2. Hasil Regresi.....	73
3. Data Variabel.....	78
4. Laporan Keuaga.....	84

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan diberikannya otonomi daerah tersebut setiap daerah diberikan kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000, menerangkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pengalokasian sumberdaya dalam APBD ini pemerintah daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif, terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PAS) sebagai panduan (*guidance*). KUA dan PPAS merupakan perwujudan dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup

tentang kebijakan jangka pendek (tahunan), jangka menengah (5 tahunan) dan kebijakan jangka panjang (10 tahunan) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Maka dari itu untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan belanjanya untuk hal-hal yang produktif. Seperti yang dikemukakan oleh Saragih (2003), menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Dengan adanya pembangunan di daerah akan mendorong kegiatan perekonomian pada daerah tersebut. Jika sarana dan prasarana memadai, maka masyarakat akan melakukan aktivitas sehari-hari secara aman dan nyaman sehingga berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat, selain itu dengan adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong atau menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan tentunya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sesuai dengan pernyataan Yohanes Yuli Ari Widodo dalam Abdul Halim (2011: 225) menyatakan bahwa apabila pemerintah Indonesia mampu untuk melakukan

belanja modal dengan bijaksana, maka diharapkan akan mampu memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian nasional. Selain itu pada tahun 2011 Bank Dunia telah mengingatkan kepada pemerintah Indonesia bahwa belanja modal dapat berpengaruh terhadap kinerja berbagai badan pemerintah.

Namun kenyataannya belanja daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja rutin yang kurang produktif. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu menerangkan bahwa rasio belanja modal lebih kecil dari pada rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Pada tahun 2014 besarnya belanja modal kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu rata-rata hanya sebesar 21,53% dari total belanja, sedangkan besarnya belanja pegawai rata-rata sebesar 47,88% dari total belanja. Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa hampir 50% dari total belanja daerah digunakan untuk membayar upah/gaji pegawai pemerintah daerah. Hal tersebut menyebabkan Provinsi Bengkulu menjadi salah satu provinsi yang mempunyai rasio belanja modal terhadap total belanja daerah secara agregat Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia dengan nilai dibawah rata-rata yakni pada tahun 2011 besarnya rasio belanja modal sebesar 21.4% dengan rata-rata sebesar 22.9% dengan 19 provinsi masih dibawah rata-rata. Sedangkan pada tahun 2014 rasio belanja modal Provinsi Bengkulu masih dibawah rata-rata yakni sebesar sekitar 23% dengan rata-rata sebesar 25.86% dengan 18 provinsi dibawah rata-rata.

Besarnya belanja pegawai di Kabupaten/Kota di Bengkulu ini disebabkan karena banyaknya pegawai di pemerintahan Bengkulu. Sehingga secara rutin

pemerintah akan melakukan pengeluaran untuk menggaji pegawai. Hal tersebut juga menandakan bahwa pemerintah setempat hanya melakukan pembangunan jangka pendek. Selain itu menurut Johan Budi SP juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat di Bengkulu dikutip dari laman www.bengkuluexpress.com penyebab lainnya ialah banyaknya temuan bahwa belanja pegawai tidak hanya sebatas membayar gaji rutin setiap bulannya, namun juga terdapat honor disetiap kegiatan dan nilainya sangat besar. Hal tersebut dikarenakan pemberian honor tersebut bukan berdasarkan waktu, tetapi berdasarkan kegiatan. Semakin banyak kegiatan unit kerja pemerintah daerah, maka semakin besar honor bagi panitia kegiatan, sehingga akan menimbulkan pengeluaran yang tinggi, dan menandakan bahwa pemerintah daerah masih belum efisien dalam mengelola anggaran. Pada tahun 2013-2014 Bengkulu mempunyai rasio tertinggi belanja pegawai terhadap total belanja se Indonesia.

Menurut BPS provinsi Bengkulu sedikit banyaknya belanja modal dipengaruhi oleh besarnya kegiatan pembangunan di daerah. Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Bengkulu tahun 2012 yang diakses dilaman www.bengkuluprov.go.id masih banyak permasalahan daerah pada daerah Bengkulu yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Misalnya di bidang infrastruktur wilayah. Infrastruktur transportasi di wilayah Provinsi Bengkulu masih belum memadai, misalnya pada transportasi darat mencakup masih rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur jaringan jalan dan fasilitas lalu lintas. Pada

transportasi udara ialah keberadaan bandar udara termasuk perintis masih belum memadai untuk menampung *demand* (penumpang dan barang). Sedangkan pada transportasi laut, kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas kurang memadai serta adanya kendala yang disebabkan faktor alam. Selain itu juga masih terdapat permasalahan di bidang pendidikan yakni rendahnya mutu dan akses pendidikan. Pada bidang kesehatan, yaitu kurangnya tenaga medis dan paramedis yang belum terdistribusi secara merata. Pada bidang ekonomi, struktur perekonomian masih didominasi oleh struktur primer terutama pertanian sedangkan nilai tambah dan daya saing produk-produk pertanian masih rendah. Pada bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan, yaitu jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi dimana pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu menempati ranking ke-2 tertinggi di Sumatera.

Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada laman www.pedomanbengkulu.com (DPD RI) Dapil Bengkulu Riri Damayanti John Latief saat sidang paripurna di Senayan Jakarta menyatakan beberapa hambatan dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan irigasi di Bengkulu ialah tidak mencukupinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu kendala lain untuk pembangunan ialah banyaknya kawasan hutan lindung dan cagar alam di Provinsi Bengkulu. Terhambatnya pembangunan infrastruktur tersebut mempengaruhi potensi pertumbuhan ekonomi, tersendatnya pengembangan potensi wisata, dan mempersulit jalur lalu lintas perdagangan maupun sarana

transportasi antar provinsi di Bengkulu. Selain itu adanya krisis listrik di Bengkulu yang disebabkan oleh kurangnya suplay daya, kurangnya debit air di PLTA Musi, dan pembangunan gardu induk yang belum maksimal. Sehingga adanya kerugian disektor bisnis, terganggunya sarana pendidikan maupun pemerintahan, dan kegiatan masyarakat lainnya.

Selain hal di atas menurut LAKIP yang menyebabkan permasalahan dalam pembangunan ialah optimalnya pembangunan “capacity building” pada institusi-institusi pemerintahan sehingga kurang berperan dalam alokasi sumber daya secara efektif dan efisien. Selain itu masih rendahnya moralitas di jajaran pemerintahan yang tercermin dalam banyaknya kasus pelanggaran asusila dan narkoba serta korupsi di daerah. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadikan hal tersebut menjadi lahan untuk korupsi. Di daerah Bengkulu partisipasi masyarakat dan aparatur Negara dalam melaksanakan pembangunan juga masih rendah. Sehingga hal tersebut menjadi penghambat dalam pembangunan daerah.

Terhambatnya pembangunan infrastruktur di daerah sehingga mempengaruhi potensi pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan Bengkulu mempunyai PAD yang rendah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal

pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan sedikitnya PAD. Menurut Kuncoro (2004: 8-9) ketergantungan fiskal antara pusat dan daerah masih tinggi, hal ini dilihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer dari pusat. Dari pernyataan tersebut, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu dapat diketahui rasio PAD terhadap total pendapatan tahun 2014 hanya sebesar 11,94%, sedangkan belanja daerah terhadap penerimaan/pendapatan sebesar 97,41%. Hal tersebut berarti bahwa PAD yang dihasilkan pemerintah Provinsi Bengkulu masih sangat sedikit dan tidak mencukupi untuk membayar upah gaji pegawai, dimana hampir 50% belanja daerah digunakan untuk belanja pegawai. Sehingga untuk pembiayaan pembangunan yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu masih sangat kurang. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki ketergantungan keuangan terhadap transfer pusat sangat besar.

Menurut Aliantor Harahap ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pada laman www.kupasbengkulu.com , menyatakan bahwa yang menyebabkan PAD rendah ialah minimnya faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Masih rendahnya kualitas SDM dibidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam menjalani mekanisme pembangunan daerah yang mengakibatkan PAD rendah dikarenakan masih banyak potensi-potensi daerah yang belum tergali. Seperti potensi kemaritiman dan kepariwisataan. Pada Bengkulu dalam angka tahun

2014. Bengkulu memiliki panjang pantai hampir 525 Km, tetapi potensi kemaritiman Bengkulu masih belum dapat dimanfaatkan dengan optimal. Dikarenakan dalam penangkapan ikan masih menggunakan alat-alat tradisional seperti pukat kantong dan jaring angkat. Di Bengkulu juga masih banyak tempat-tempat wisata yang dapat dikembangkan, tetapi masih sedikit wisata yang berkunjung. Pada tahun 2013 kunjungan wisata asing perhari berjumlah 19 orang, dan wisatawan domestik 175 orang. Hal ini dikarenakan masih minimnya fasilitas jalan dan kapasitas bandara yang sedikit.

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, sehingga hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber pada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. UU No 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dialokasikan dari APBN kepada daerah. Menurut Kuncoro (2004: 30), "...tujuan penting pengalokasian DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia." Dengan adanya transfer diharapkan pemerintah daerah di Indonesia dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun pada kenyataannya transfer dari pemerintah merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai oprasi utamaya sehari-hari. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2014

rasio transfer pada kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu sebesar 75,35% dari total pendapatan dengan rasio DAU dan DAK sebesar 70,57% terhadap total pendapatan. Dari beberapa hal tersebut menunjukkan DAU dan DAK menjadi sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari.

Penggunaan DAU dalam kegiatan pemerintahan juga belum efektif dan efisien. DAU seharusnya digunakan untuk melakukan pembangunan fasilitas umum sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi DAU digunakan untuk menambah kapasitas pembangunan pada institusi pemerintahan dimana manfaatnya tidak dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat seperti untuk melakukan belanja pegawai dan belanja hibah. Misalnya pada Kota Bengkulu tahun 2011 berdasarkan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) Dinas Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga DAU digunakan untuk kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, pengadaan konstruksi gedung kantor, kegiatan pengadaan seragam untuk hari-hari khusus, kegiatan pembinaan olahraga, kegiatan pengiriman atlet, keseluruhan total dana hampir Rp. 300.000.000,00.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No.33 Tahun 2004). Dalam penggunaannya DAK diatur

oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk kegiatan fisik. Oleh sebab itu dalam penelitian ini DAK tidak digunakan sebagai variabel independen yang memengaruhi Belanja Modal (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 41).

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014. Dikarenakan terdapat masalah mengenai Belanja Modal, PAD, dan DAU sesuai dengan yang tertera di atas. Selain itu masih sedikitnya penelitian dengan topik terkait.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berusaha ingin mengetahui apakah PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014. Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu periode 2010 – 2014”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belanja modal pada Kabupaten/Kota Bengkulu tahun 2014 masih dibawah rata-rata 23% dengan rata-rata sebesar 25.86%.
2. Sedikitnya Belanja Modal dikarenakan Pemerintah daerah masih belum efisien dalam mengelola anggaran.
3. Terkendalanya pembangunan infrastruktur di Bengkulu juga mengakibatkan belanja modal daerah sedikit.
4. Terkendalanya pembangunan daerah mengakibatkan kegiatan perekonomian terhambat sehingga PAD di Bengkulu rendah, sehingga tidak mencukupi untuk melakukan belanja modal.
5. Rendahnya PAD mengakibatkan tingginya transfer dari pemerintah pusat yakni sebesar 75,35% dengan DAU dan DAK sebesar 70,57% menandakan dana transfer belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya melainkan menjadi sumber pembiayaan utama, serta kurangnya kemandirian daerah.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tidak mengkaji seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian akan dibatasi ruang lingkup permasalahan yang dilakukan pada faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan

Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten/Kota pada Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010 – 2014?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010 – 2014?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010 – 2014?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010 – 2014.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010 – 2014.
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010 – 2014.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pengembang ilmu pengetahuan mengenai topik terkait.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan data tambahan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah daerah diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal.
 - b. Bagi peneliti
Menambah pengetahuan penulis khususnya dalam bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Belanja Modal

a. Pengertian Belanja Modal

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan Belanja Modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari hari satu satuan kerja bukan untuk dijual. Sedangkan menurut Abdul Halim (2004:101), “Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Mardiasmo (2002: 67), “belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharanya. Belanja modal ini dilakukan dalam rangka pembentukan modal”. Berdasarkan beberapa sumber diatas, belanja modal adalah belanja aset atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun

anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, serta aset tersebut dipergunakan untuk operasional sehari-hari bukan untuk dijual.

b. Jenis-jenis Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, belanja modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah dalam pengeluarannya/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pertambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan

pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang esenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Berdasarkan pemaparan diatas, jenis-jenis belanja modal dibagi dalam lima kategori belanja modal tanah, belanja modal

peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Besarnya pengeluaran belanja modal ini termasuk biaya untuk perolehannya hingga aset tersebut dapat digunakan sekaligus perawatannya.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Terdapat beberapa penelitian dan pendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal. Menurut Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007: 18) mengemukakan bahwa faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi belanja modal ialah pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sedangkan menurut Imoratus Sholikhah dan Agus Wahyudin (2014: 561), mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal ialah PAD, DBH, DAU, dan Luas wilayah daerah.. Menurut Muh Adib Irsyadi (2014: 10), dalam penelitiannya faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal ialah DAU, PAD, DAK, dan Silpa. Berdasarkan penelitian Eka Sintala Dewi Anjani, Akram, dan Lilik Handajani (2015: 17), PAD, DAU, dan Silpa merupakan faktor penentu belanja modal pada Pemerintah Daerah di NTB.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Hanif Nurcholis (2007:182) “Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah”. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah dari potensi daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana PAD sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6 ayat 1, terdapat empat sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.

1) Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terdiri dari:

a) Pajak Provinsi

(1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar

kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotro.

(4) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemafaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yag berada dilaut maupun di darat.

b) Pajak Kabupaten/Kota

(1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, ruma penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos degan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)

(2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

(3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

(4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

(5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah

mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.

(7) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.

(8) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

(9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan arang burung walet.

(10) Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah, dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

(11). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

2) Retribusi

Retribusi daerah adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2003:100) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Ahmad Yani (2004:55)“Retribusi Daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan dan pembangunan daerah.

Selain itu Ahmad Yani (2004:56) juga berpendapat Retribusi Daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

- a) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - b) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Hanif Nurcholis (2007:184), hal tersebut dapat dilakukan oleh daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, Pasar, tempat hiburan, vila, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, meliputi:
 - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan,
 - b) Jasa giro,
 - c) Pendapatan bunga,
 - d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
 - e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat adri penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas sumber-sumber PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak daerah sendiri diagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

c. Maksud dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Maksud Pendapatan Asli Daerah adalah supaya pemerintah lebih optimal dalam menggali potensi pendapatan daerah, Karena dalam melaksanakan otonomi daerah sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-

sumber di luar PAD Pendapatan Asli Daerah bertujuan agar pendapatan yang diperoleh dapat digunakan sesuai dengan perkara dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian pemerintah seperti dana perimbangan sifatnya lebih terikat.

Perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penggalan dana peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan urusan daerah (UU No 33 thn 2004).

3. Dana Alokasi Umum(DAU)

a. Pengertian Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Halim (2014: 124), “DAU adalah transfer dana yang bersifat *“bock grant”*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleuasaan dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah”.

Mudrajad Kuncoro (2004: 63) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima banyak daripada daerah kaya.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas DAU adalah dana yang bersumber pada APBN yang ditujukan pada daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi. Dari beberapa pendapat di atas, DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

b. Faktor faktor yang mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh setiap daerah akan dipengaruhi oleh beberapa variabel. Antara lain:

- 1) Alokasi dasar yaitu jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di daerah.
- 2) Jumlah penduduk yang ada di daerah.
- 3) Luas wilayah daerah.
- 4) Indek kemahalan kontruksi daerah.
- 5) Produk regional bruto per kapita daerah
- 6) Indek pembangunan daerah.

- 7) Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan setiap tahun dan,
- 8) Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh dari pemerintah pusat setiap tahunnya.

c. Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27, ketentuan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (duapuluh enam persen) dari pendapatan bersi dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- 2) Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung ari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
- 3) Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada poin 2 belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (Sembilan puluh persen)
- 4) Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditetapkan dalam APBN.

Tabel 1 . Formulasi Untuk Menghitung Besarya DAU Berdasarkan Pendapatan Netto dalam APBN

Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam hal Dana Alokasi Umum (DAU) belum dapat dihitung secara kuantitatif		
Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk Kabupaten dan KOTA
26% x APBN	10 x 26% x APBN	90% x 26% x APBN

Sumber: PP Nomor 55 Tahun 2005

B. Penelitian yang Relevan

1. Fitria Megawati Sularno (2013)

Penelitian yang Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif. Analisis dalam penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linier berganda.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan variabel independen PAD dan DAU, serta sama-sama menggunakan variabel dependen Belanja Modal. Perbedaan pada penelitian terdahulu juga menggunakan variabel independen pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data juga sama-sama

menggunakan metode dokumentasi. Selain itu dalam menganalisis data juga sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Pertumbuhan Ekonomi PAD, dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi PAD, dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2. Pungky Ardhani (2011)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2007-2009. Metode pengambilan data yang digunakan adalah metode sensus dengan mengambil seluruh populasi. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama menggunakan variabel dependen PAD dan DAU serta variabel dependen Belanja Modal. Pada penelitian terdahulu juga menggunakan variabel dependen pertumbuhan ekonomi dan DAK. Penelitian terdahulu

menggunakan studi kasus pada kabupaten/kota di Jawa Tengah sedangkan pada penelitian ini studi kasus pada kabupaten/kota di Bengkulu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian tersebut ialah secara parsial PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan DAK berpengaruh positif namun tidak signifikan. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

3. Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007).

Penelitian yang berjudul “Pengaruh pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama menggunakan variabel independen DAU dan PAD, tetapi dalam penelitian terdahulu menggunakan variabel independen Pertumbuhan Ekonomi. Selain itu sama-sama menggunakan Belanja Modal sebagai variabel dependen.

Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah pemerintah daerah se Jawa-Bali baik Kabupaten dan Kota dari tahun 2004 – 2005. Sedangkan pada penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010 – 2014.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi positif tetapi tidak signifikan. Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

4. Fiona Puspita Devi Purwanto (2013)

Penelitian yang berjudul, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)”. populasi dalam penelitian tersebut adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011 yang berjumlah 33 kabupaten dan kota. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama menggunakan variabel independen PAD dan DAU dan variabel dependen

belanja modal, tetapi penelitian terdahulu juga menggunakan variabel independen pertumbuhan ekonomi. Selain itu rentang waktu yang diteliti juga berbeda, penelitian terdahulu menggunakan rentang waktu empat tahun yakni dari 2008 hingga 2011, sedangkan penelitian ini rentang waktunya 7 tahun yakni 2010 hingga 2014. Untuk uji analisis datanya sama-sama menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis sama-sama menggunakan regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Sedangkan obyek yang diteliti berbeda.

Hasil penelitian tersebut ialah secara parsial Pertumbuhan Ekonomi dan DAU berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

C. Kerangka Berfikir

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan daerah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. PAD menggambarkan kemampuan daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber penghasilan dari daerahnya sendiri. Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik.

Besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan besarnya belanja modal, maka harus menggali PAD yang besar. Sehingga peningkatan PAD diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal oleh pemerintah daerah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umu terhadap Belanja Modal

Setiap daerah memiliki kemamuan keuangan yang berbeda-beda dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, sehingga hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber pada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana tersebut ialah Dana Alokasi Umum (DAU). Sehingga DAU menjadi salah satu sumber pendapatan daerah selain PAD. DAU ini memiliki fungsi sama seperti PAD yaitu sama-sama membiayai kebutuhan belanja daerah termasuk salah satunya Belanja Modal. Meskipun DAU merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat, DAU menjadi pembiayaan utama bagi beberapa daerah. Sehingga dapat disimpulkan besarnya DAU diharapkan dapat berpengaruh terhadap Belanja Modal.

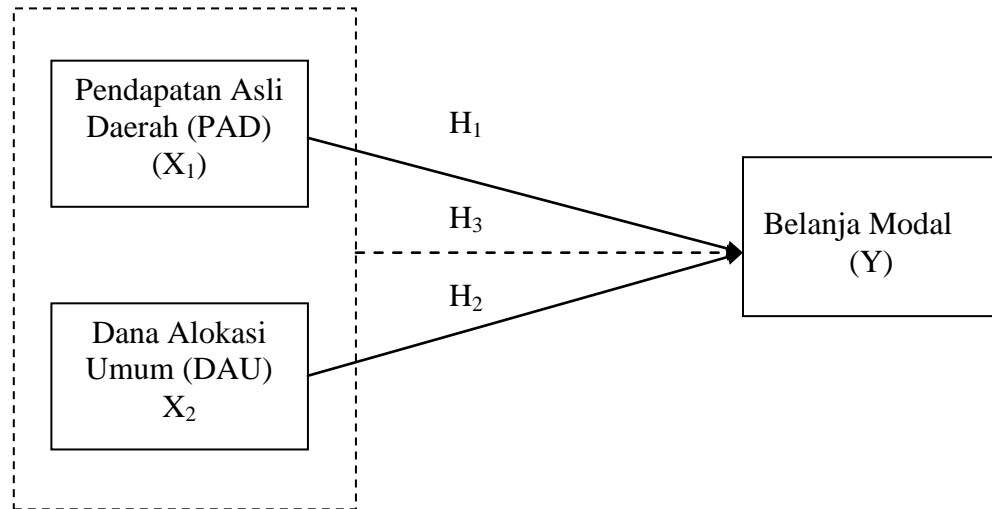
3. Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum merupakan kedua sumber penerimaan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah termasuk Belanja Modal. Belanja Modal ini dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan *Publick Service* kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan pelayanan public, sehingga pemerintah harus berfokus pada Belanja Modal. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalisasi penggunaan dari sumber penerimaan daerah yaitu PAD dan DAU. Jika PAD dan DAU meningkat, maka diharapkan dapat berpengaruh terhadap Belanja Modal.

D. Paradigma Penelitian

Bedasarkan kerangka berfikir diatas, maka dpat digambarkan hubungan variabel independen dan variabel dependen sebaagai berikut:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan:

- = Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
- - - - -→ = Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama

E. Hipotesis

1. H₁ = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaen/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014.
2. H₂ = Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaen/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014.

3. H_3 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umu (DAU) secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaen/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif yaitu penelitian yang berusaha menyelidiki hubungan sebab-akibat melalui pengamatan terhadap konsekuensi yang telah terjadi dan menganalisis data yang ada untuk menemukan faktor-faktor penyebab (Azwar Saifuddin, 2001:9). Metode penelitian ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2011:7)

B. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang berjumlah 10, dalam kurun waktu 5 tahun sehingga berjumlah 50. Keseluruhan populasi dalam penelitian ini digunakan sebagai subyek penelitian.

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011 :38)

1. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011: 39). Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah

a. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2007:101).

2. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2011 :39). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan pengambilan data dengan mengambil gambar, catatan, atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2011: 199). Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data Realisasi APBD Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu (www.bengkulu.bps.go.id) dan dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.depkeu.go.id).

E. Teknik Analisi Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah alat statistik yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menjelaskan tentang gambaran objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan secara umum atas objek yang diteliti tersebut (Sugiyono, 2005: 29). Menurut Ghazali (2011: 19) “Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum,dan range...,”.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Heteroskedastisitas

“Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”(Ghozali, 2011:139). Salah satu cara untuk mendiagnosis adanya heteroskedastisitas dalam satu model regresi adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Adapun atas dasar analisis dengan melihat grafik plot adalah sebagai berikut:

- 1) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

b. Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011: 105). Pengujian ini dengan bantuan program SPSS pada Collinearity Diagnostics dengan hasil: jika nilai *tolerance* variabel independen $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10

menunjukkan bahwa tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, bila terjadi multikolinearitas berarti tidak lolos uji tersebut.

c. Uji Auto Korelasi

Uji auto korelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya (Ghozali, 2011:110). Pada penelitian ini, untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi digunakan uji *Durbin Watson* (DW) dengan criteria sebagai berikut:

- 1) $0 < d < dl$, berarti tidak ada autokorelasi positif dan keputusannya ditolak.
- 2) $dl \leq d \leq du$, berarti tidak ada autokorelasi positif dan keputusannya *no decision*.
- 3) $4 - dl < d < 4$, berarti tidak ada autokorelasi negatif dan keputusannya ditolak.
- 4) $4 - du \leq d \leq 4 - dl$, berarti tidak ada autokorelasi negatif dan keputusannya *no decision*.
- 5) $Du < d < 4 - du$, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan atau kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2007:261). Analisis regresi linier sederhana ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama sampai hipotesis ketiga dengan mencari koefisien regresi (b) dan konstanta (a) antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen.

1) Persamaan regresi linier sederhana

Adapun bentuk model yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Subjek dalam variabel dependen

a = Harga Y bila X = 0(harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen.

Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan

X= Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. (Sugiyono, 2007)

2) Koefisien Korelasi (r)

Koefisien korelasi antar variabel masing-masing independen dan variabel dependen digunakan untuk mengetahui hubungan yang positif atau negatif antar variabel independen dan dependen. Nilai koefisien korelasi berada pada kisaran angka minus satu (-1) sampai dengan plus satu (+1).

Nilai koefisien korelasi minus menunjukkan hubungan yang terbalik antara variabel independen dengan variabel dependen, dimana pengaruh yang terjadi adalah pengaruh yang negatif. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan yang searah antara variabel independen dengan dependen, dimana pengaruh yang terjadi adalah pengaruh positif (Purbayudo dan Ashari, 2005: 210).

3) Koefisien Determinasi (r^2)

Menurut Sugiyono (2007: 231), koefisien determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkan korelasi (r). koefisien determinasi memiliki nilai antara nol dan satu. Semakin kecil nilai rata-rata r^2 maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin lemah. Sedangkan determinasi yang mendekati angka satu menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen mendekati sempurna.

b. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (Sugiyono, 2007:275).

1) Persamaan regresi berganda

Model persamaan analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y = variabel Belanja Modal

a = konstanta

b_1 = koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b_2 = koefisien Dana Alokasi Umum (DAU)

X_2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

(Sugiyono, 2007: 275)

2) Mencari Koefisien Korelasi Ganda (R)

Analisis koefisien korelasi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap variabel dependen berupa Belanja Modal. variabel independen PAD dan DAU berpengaruh

positif jika koefisien korelasi (R) bernilai positif dan berpengaruh negative jika koefisien korelasi (R) bernilai negatif.

3) Menguji Koefisien Determinasi Ganda (R^2)

Analisis ini bertujuan untuk menghitung besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen yang dihitung dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi (R).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu berjumlah 10 Kabupaten/Kota. Provinsi Bengkulu merupakan Provinsi yang berada di pulau Sumatra berbatasan sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Barat, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan provinsi Lampung, di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu yang menjadi populasi dari penelitian ini ada 10 Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a) Kab. Bengkulu Selatan
- b) Kab. Bengkulu Utara
- c) Kab. Rejang Lebong
- d) Kota Bengkulu
- e) Kab. Kaur
- f) Kab. Seluma
- g) Kab. Muko-muko

- h) Kab. Lebong
- i) Kab. Kepahiang
- j) Kab. Bengkulu Tengah.

Data pada penelitian ini (N) sebanyak 50, data didapatkan dari laporan realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014 yang seluruhnya menyampaikan laporan kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010-2014. Setelah dilakukan seleksi data, maka dapat diketahui terdapat data *outliers* pada penelitian. Data *outliers* adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data yang lainnya dalam satu rangkaian data, sata *outliers* yang memiliki karakteristik unik dihilangkan agar tidak mengganggu pengujian dalam peelitian ini.

Tabel 2. Tabel Prosedur Penentuan Data

Prosedur Penentuan Data	Jumlah
1. Laporan Realisasi APBD 2010-2014	50
2. Data <i>Outliers</i>	(10)
Total data yang digunakan	40

2. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu data pada variabel-variabel yang digunakan. Pengukuran yang digunakan dalam analisis statistik diskriptif dalam penelitian ini menggunakan minimum, maksimum, rata-rata (*mean*),

standar deviasi dan range. Dengan melakukan perhitungan statistik deskriptif, maka dapat diketahui gambaran tentang data Belanja Modal sebagai variabel dependen, dan Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen. Gambaran mengenai data tersebut dapat dilihat dalam tabel statistik sebagai berikut ini:

Tabel 3. Rangkuman Data Khusus

Var	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviasi
PAD	40	3138	81755	20834.9250	16388.08073
DAU	40	208428	602742	360519.8750	94232.40358
BM	40	44998	213413	113192.6000	34409.68042

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel independen PAD memiliki nilai minimum sebesar 3138,00 atau sama dengan Rp. 3.138.000.000 diperoleh dari Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2010 dan nilai maksimum sebesar 81755,00 atau sama dengan Rp. 81.755.000.000 diperoleh dari Kota Bengkulu pada tahun 2014. Jumlah populasi yang diteliti berjumlah 40. Nilai *mean* sebesar 20834,9250 atau sama dengan Rp. 20.834.925.000 dan standar deviasi sebesar 16388,08073 atau sama dengan Rp. 16.388.080.730.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel independen DAU memiliki populasi sebesar 40. Nilai maksimum sebesar 602742,00

atau sama dengan Rp. 602.742.000.000 diperoleh dari Kota Bengkulu tahun 2014, dan minimum sebesar 208428,00 atau sama dengan Rp. 208.428.000.000 diperoleh dari Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2010. Nilai *mean* sebesar 360519,8750 atau sama dengan Rp. 360.519.875.000, dan standar deviasi sebesar 94232,40358 atau sama dengan Rp. 94.232.403.580.

c. Belanja Modal

Berdasarkan tabel di atas variabel independen belanja modal memiliki jumlah populasi sebanyak 40. Memiliki nilai minimum sebesar 44998,00 atau sama dengan Rp. 44.998.000.000 diperoleh dari Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2010 dan maksimum sebesar 213413,00 atau sama dengan Rp. 213.413.000.000 diperoleh dari Kabupaten Seluma pada tahun 2014. Nilai *mean* sebesar 113592,6 atau sama dengan Rp 113.592.600.000 dan standar deviasi sebesar 34409,68042 atau samadengan Rp. 34.409.680.420.

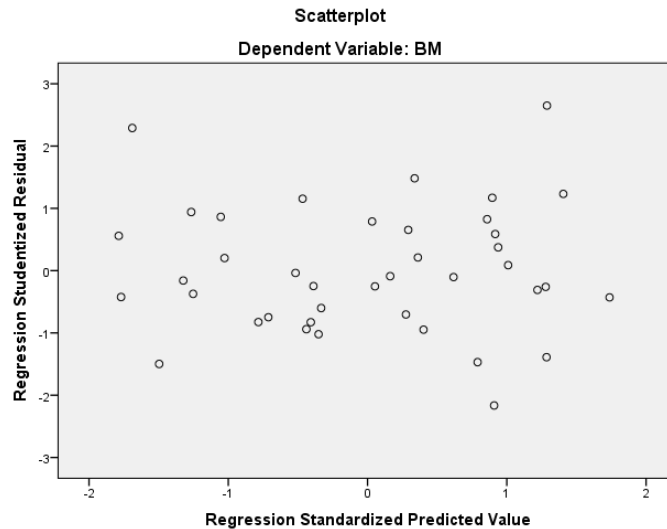
3. Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139) di dalam pengujian

heteroskedastisitas pada penelitian ini didasarkan pada *Scatterplot*. Berdasarkan pengujian dengan bantuan program statistik diperoleh grafik *Scatterplot* sebagai berikut:



Gambar 4. Diagram Heteroskedastisitas

Salah satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-studentized (Ghozali, 2011:139).

Dari gambar di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, tidak ada pola tertentu yang teratur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

2) Multikolonieritas

Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Jika tidak terjadi korelasi antar variabel bebas berarti model regresi tersebut baik. Pengujian ini dengan bantuan aplikasi statistik pada *Collinearity Diagnostics* dengan hasil: jika nilai *tolerance* variabel independen $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 menunjukkan bahwa tidak adanya multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. Berikut hasil uji multikolonieritas dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya VIF:

Tabel 4. Uji Multikolinierits

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Kesimpulan
PAD	0,212	4,726	Tidak terkena multikolinieritas
DAU	0,212	4,726	Tidak terkena multikolinieritas

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki *tolerance* kurang dari 0,10, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen. Sedangkan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam regresi.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah dalam model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan nilai uji Durbin-Watson (D-W)

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

dU	dL	<i>Durbin Watson</i>	Kesimpulan
1,6000	1,3908	1,706	Tidak terjadi autokorelasi

Dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5%, jumlah data 40 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2), maka dari tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai batas atas (dU) 1,6000, dan batas bawah (dL) 1,3908. *Durbin Watson* (DW) terletak diantara dL dan $4 - dU$. Nilai dL sebesar 1,3908 dan dU sebesar 1,6000, $4 - 1,6000 = 2,4000$ dan hasilnya diperoleh $1,3908 < 1,706 < 2,4000$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi ini.

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Teknik analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Sedangkan teknik analisis regresi berganda

digunakan untuk menguji hipotesis ketiga. Teknik analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan program statistik.

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014”. Dengan bantuan program statistik diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Var	Nilai r		Sig	Konstanta	Koefisien
	r	r ²			
PAD	0,279	0,078	0,081	100.967,663	0,587

1) Persamaan Regresi

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel diatas dapat ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = 100967,663 + 0,587X_1$$

Nilai konstanta sebesar 100.967,663 berarti bahwa Belanja Modal akan sebesar 100.967,663 jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama dengan nol. Koefisien regresi PAD bernilai 0,587 menunjukkan bahwa apabila PAD meningkat 1 persen maka Belanja Modal akan

meningkat sebesar 0,587 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

2) Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi bernilai positif sebesar 0,279, menandakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

3) Koefisien Determinasi Sederhana

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,279, sehingga didapat nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,078. Dari nilai tersebut dapat diartikan bahwa sebesar 7,8% variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh PAD.

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu” dapat diterima.

b. Pengujian Hipotesis kedua

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah, “Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014”. Dengan

bantuan program statistik diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Dana Alokasi Umum(DAU)

Var	Nilai r		Sig	Konstanta	Koefisien
	r	r ²			
PAD	0,426	0,181	0,006	57.168,137	0,155

1) Persamaan Regresi

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel diatas dapat ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = 57.168,137 + 0,155X_2$$

Nilai konstanta sebesar 57.168,137 hal ini berarti bahwa Belanja Modal akan sebesar 57.168,137 jika Dana Alokasi Umum (DAU) sama dengan nol. Koefisien regresi DAU sebesar 0,155 menunjukkan bahwa apabila DAU meningkat 1 persen maka belanja modal akan meningkat sebesar 15,5% persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

2) Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi (r) bernilai positif sebesar 0,426, menandakan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

3) Koefisien Determinasi Sederhana

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,426, sehingga didapat nilai koefisien

determinasi (r^2) sebesar 0,181. Dari nilai tersebut dapat diartikan bahwa sebesar 18,10% variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh DAU.

Berdasarkan uji hipotesis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil analisis, maka hipotesis kedua yang menyatakan, "Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014" diterima.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Tabel 8. Hasil Regresi Linier Berganda

Var	Nilai R		Sig	Konstanta	Koefisien
	R	R ²			
PAD	0,427	0,227	0,009	23.147,732	-0,977
DAU					0,306

1) Persamaan Regresi

Berdasarkan nilai konstanta dan koefisien regresi pada tabel di atas, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 23.147,734 - 0,977X_1 + 0,306X_2$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui:

- a) Nilai konstanta sebesar 23.147,734 berarti bahwa jika seluruh variabel indepen dianggap konstan yaitu Pendapatan Asli Daerah

(PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU), maka nilai variabel dependen yaitu belanja modal akan sebesar 23.147,734.

- b) Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -0,977 berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin PAD (variabel Dana Alokasi Umum dianggap bernilai 0), maka nilai belanja modal akan sebesar -0,977.
- c) Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,306 berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin DAU (variabel Pendapatan Asli Daerah dianggap bernilai 0), maka nilai belanja modal akan sebesar 0,306.

2) Koefisien Korelasi

Berdasarkan tabel di atas nilai koefisien korelasi bernilai positif yakni 0,476. Hal ini menyatakan bahwa secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

3) Koefisien Determinasi Ganda (R^2)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi ganda (R^2) sebesar 0,272. Nilai ini menunjukkan bahwa Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014 dipengaruhi oleh 27,2% variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan “Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014” diterima.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014

Hasil dari analisis diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r) yang bernilai positif sebesar 0,279. Koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,078 yang berarti bahwa sebesar 7,8% variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD. Nilai konstanta sebesar 100.967,663 menunjukkan bahwa jika variabel PAD dianggap konstan, maka nilai belanja modal akan sebesar 100.967,663. Nilai koefisien regresi sebesar 0,587 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin PAD akan menaikkan belanja modal sebesar 0,587. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD maka Belanja Modal akan semakin meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sularno (2013) yang menyatakan bahwa variabel PAD memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil analisis besarnya koefisien determinasi (r^2) besarnya Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD hanya 7,8%. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala dalam PAD, diantaranya masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam menjalani mekanisme pembangunan daerah yang mengakibatkan PAD daerah rendah dikarenakan masih banyak potensi-potensi daerah yang belum tergali.

Dari hasil pengujian di atas menandakan bahwa adanya keterkaitan antara PAD dengan Belanja Modal. Semakin PAD bertambah, maka Belanja Modal akan bertambah. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, dimana pendapatan tersebut akan digunakan untuk melakukan kegiatan pembangunan di daerah melalui Belanja Modal. Pembangunan tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong kegiatan perekonomian. Dengan meningkatnya kegiatan perekonomian akan menyebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat juga daerah. Oleh sebab itu PAD mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hipotesis kedua yang menyatakan “Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014” terbukti. Ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,426 bernilai

positif, maka jika PAD naik Belanja Modal juga akan ikut naik. Koefisien determinasi (r^2) bernilai 0,181 yang berarti bahwa sebesar 18,1% variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel DAU. Nilai konstanta sebesar 57.168,137 menunjukkan bahwa jika variabel DAU konstan, maka variabel Belanja Modal akan bernilai 57.168,137. Nilai koefisien regresi DAU sebesar 0,155 menunjukkan bahwa apabila DAU meningkat 1 persen maka belanja modal akan meningkat sebesar 15,5% persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pungky Ardhani (2011) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil analisis besarnya koefisien determinasi (r^2) besarnya Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel DAU hanya sebesar 18,1%. Hal tersebut dikarenakan penggunaan DAU oleh pemerintah daerah digunakan untuk melakukan belanja pegawai dan belanja hibah dan tidak dapat langsung memberikan manfaat bagi masyarakat seperti belanja modal, sehingga menandakan bahwa pemerintah daerah belum efektif dan efisien dalam penggunaan DAU.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan adanya keterkaitan antara DAU dan Belanja Modal. Jika DAU mengalami kenaikan, maka akan menyebabkan Belanja Modal juga mengalami kenaikan. DAU memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. dikarenakan DAU merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah selain PAD, DAU ialah salah satu dana

transfer dari pemerintah. Dimana dana transfer tersebut penggunaannya diserahkan sepenuhnya pada daerah. DAU dapat digunakan oleh daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya melalui Belanja Modal. Belanja modal sangat penting manfaatnya bagi masyarakat. Dengan Belanja Modal akan meningkatkan pembangunan di daerah yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat juga daerah.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Variabel PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (R) yang bernilai positif sebesar 0,476. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,272 berarti bahwa sebesar 27,2% Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD dan DAU, sedangkan sisanya sebesar 72,8%. Nilai konstanta sebesar 23.147,734 berarti jika variabel PAD dan DAU konstan atau sama dengan nol, maka nilai Belanja Modal sebesar 23.147,734. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) variabel PAD, DAU dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dari hasil analisis besarnya koefisien determinasi (R^2) variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD dan DAU hanya sebesar 27,2%. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat kendala-kendala terkait PAD dan

DAU seperti yang telah dijelaskan di atas, selain itu masih ada variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini yang kemungkinan memiliki pengaruh lebih besar.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama dapat meningkatkan besarnya Belanja Modal daerah. Belanja Modal digunakan untuk melakukan pembangunan di daerah sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Meningkatnya pembangunan di daerah meliputi sarana dan prasarana, dapat menunjang kegiatan perekonomian bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kegiatan perekonomian, akan mengakibatkan meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatnya pendapatan daerah melalui PAD.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif tetapi terhadap Belanja Modal pada Kabupaen/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r) bernilai positif sebesar 0,279. Nilai konstanta sebesar 100.967,663 berarti bahwa Belanja Modal akan sebesar 100.967,663 jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama dengan nol. Koefisien determinasi r^2 0,078 yang berarti sebesar 7,8% variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD. Koefisien regresi PAD bernilai 0,587 menunjukkan bahwa apabila PAD meningkat 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,587 persen dengan asumsi variabel independen yang lain konstan.
5. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaen/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r) bernilai positif sebesar 0,426. Koefisien determinasi (r^2) bernilai 0,181 yang berarti bahwa sebesar 18,1% variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel DAU. Nilai konstanta sebesar 57.168,137 menunjukkan bahwa jika variabel DAU konstan, maka variabel Belanja Modal akan bernilai 57.168,137. Nilai koefisien regresi

DAU sebesar 0,155 menunjukkan bahwa apabila DAU meningkat 1 persen maka belanja modal akan meningkat sebesar 15,5% persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi (R) yang bernilai positif sebesar 0,476. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,272 berarti bahwa sebesar 27,2% Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD dan DAU, sedangkan sisanya sebesar 72,8%. Nilai konstanta sebesar 23.147,734 berarti jika variabel PAD dan DAU konstan atau sama dengan nol, maka nilai Belanja Modal sebesar 23.147,734

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian di atas, maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu pengalokasiannya sangat sedikit. Sebaiknya pemerintah daerah dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal sehingga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan yang produktif.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu masih sangat sedikit. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan sumber-sumber atau potensi daerah yang belum tergali sehingga PAD dapat meningkat. Misalnya dengan mendeteksi sumber

pajak yang belum tergali dengan cara menjaring wajib pajak baru atau dengan menerbitkan pajak baru. Selain itu dalam pemungutannya harus dengan pengawasan dan pelayanan yang baik.

3. Dana Alokasi Umum (DAU) masih belum dikelola dengan baik. Disarankan kepada pemerintah daerah sebaiknya DAU dikelola dengan lebih baik lagi. Misalnya dengan meningkatkan Belanja Modal sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
4. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel dan variabel penelitian agar hasil penelitian generalisasinya lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani Eka Sintala, Handajani dkk. (2015). Faktor penentu belanja modal dan konsekuensi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat, 1-25.
- Azwar, Saifuddin. (2001). *Metode Penelitian (Edisi I Cetakan III)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darwanto & Yustikasari, Y. (2007). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.
- Fitria Megawati Sularno. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Skripsi*. Universitas Widyatama.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip
- Halim, Abdul. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Husain Umar. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kemenkeu. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar*.
- _____. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*
- _____. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- _____. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan*.

- _____. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (2014). *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- _____. (2003). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muh Adib Irsyadi. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal (studi empiris pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah), 1-13.
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Pungky Ardhani.(2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Sekripsi*. Universitas Diponegoro.
- Purbayu B. S. dan Ashari. (2005). Analisis Statistik dengan Microsoft Exel dan SPSS. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- _____. (2004). *UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*
- Sadono, Sukirno. (2012). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Setiawan, A. (2010). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro
- Sholikhah, Imoratus & Wahyudin, Agus. (2014). Analisis belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa, 553-562.

Sarangih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta:Ghalia Indonesia

Sugiyono. (2007). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta

_____. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.

Yani, Ahmad. (2004). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

www.bengkulu.bps.go.id (Diakses tanggal 1 Mei 2017)

www.bengkuluexpress.com (Diakses tanggal 21 Juli 2017)

www.bengkuluprov.go.id (Diakses tanggal 21 Juli 2017)

www.djpk.depkeu.go.id (Diakses tanggal 28 April 2017)

www.pedomanbengkulu.com (Diakses tanggal 21 Juli 2017)

www.kupasbengkulu.com (Diakses tanggal 21 Juli 2017)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
PAD	40	3138.00	81755.00	20834.9250	2591.18308	16388.08073
DAU	40	208428.00	602742.00	360519.8750	14899.45123	94232.40358
BM	40	44998.00	213413.00	113192.6000	5440.64818	34409.68042
Valid N (listwise)	40					

2. Uji Multikolinearitas

Coefficient Correlations^a

Model		DAU	PAD
1	Correlations	DAU	1.000
		PAD	-.888
	Covariances	DAU	.013
		PAD	-.067

a. Dependent Variable: BM

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
		1	(Constant)	23147.734				
	PAD	-.977	.660	-.465	-1.480	.147	.212	4.726
	DAU	.306	.115	.839	2.669	.011	.212	4.726

a. Dependent Variable: BM

3. Autokorelasi

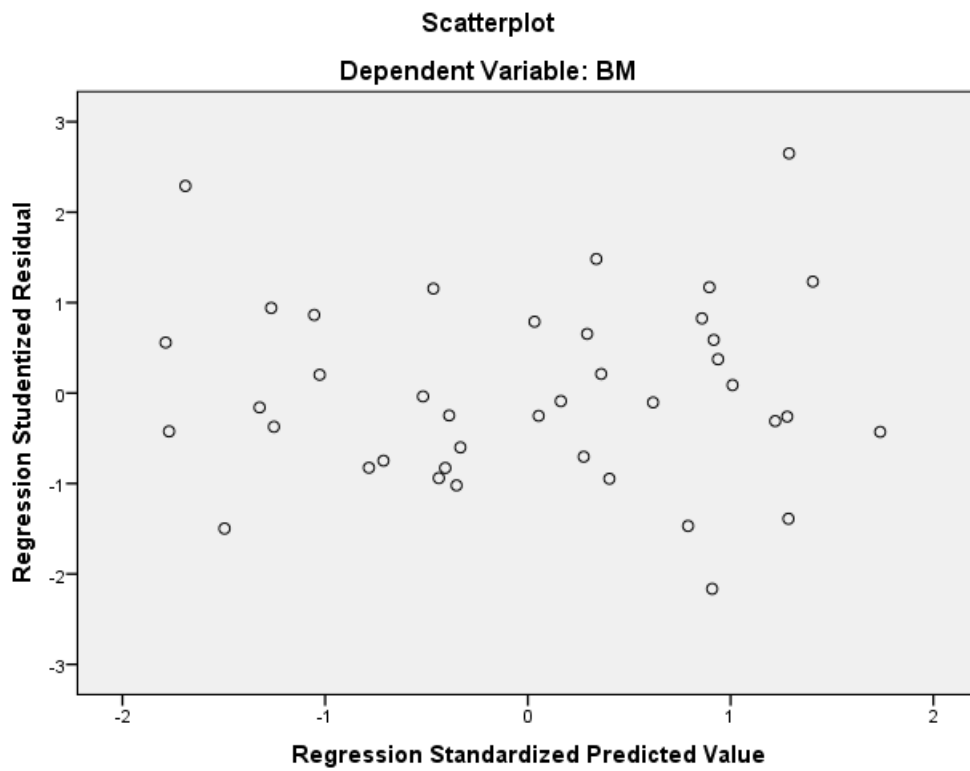
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.476 ^a	.227	.185	31062.36803	1.706

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

Heteroskedastisitas



LAMPIRAN

Lampiran 4. Laporan Keuangan

Lampiran 2. Realisasi APBD Berdasarkan SAP Tahun 2010
(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Kab. Bengkulu Utara	Kota Bengkulu	Kab. Kaur	Kab. Mukomuko	Kab. Kepahiang
	63	64	65	66	67
Pendapatan	491,578	535,672	316,149	397,650	380,348
PAD	20,354	26,678	6,046	9,035	9,640
Pajak daerah	2,533	13,059	1,019	1,884	1,902
Retribusi daerah	4,527	6,625	1,162	3,910	4,494
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1,769	1,423	1,686	1,620	2,276
Lain-lain PAD yang sah	11,526	5,571	2,180	1,620	969
Pendapatan Transfer	471,224	508,994	302,779	388,615	370,669
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	404,610	407,308	283,264	314,241	290,608
Dana Bagi Hasil Pajak	26,903	29,413	25,521	28,917	24,276
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	4,046	1,069	1,151	1,083	1,036
Dana alokasi umum	327,442	351,462	218,613	249,927	234,497
Dana alokasi khusus	46,218	25,365	37,979	34,315	30,799
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	61,958	86,496	10,862	65,715	70,368
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	61,958	86,496	10,862	65,715	70,368
Transfer Pemerintah Provinsi	4,656	15,190	8,653	8,659	9,693
Pajak Pendapatan Bagi Hasil	4,656	15,190	8,653	8,659	9,693
Lainnya Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan yang sah	-	-	7,323	-	39
Pendapatan Hibah	-	-	7,323	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	39
Belanja	490,008	543,436	314,893	347,987	379,497
Belanja Operasi	396,026	439,829	243,135	260,157	226,595
Belanja Pegawai	277,354	342,142	149,807	183,502	149,801
Belanja Barang	69,683	80,892	63,508	38,766	53,630
Belanja Bunga	-	-	-	5,923	-
Belanja Subsidi	535	-	-	-	-
Belanja Hibah	21,193	6,850	13,992	10,561	12,000

Belanja Bantuan sosial	13,318	6,595	1,776	2,987	1,218
Belanja Bantuan Keuangan	13,943	3,350	14,052	18,419	9,946
Belanja Modal	93,796	103,583	71,750	86,720	152,902
Tanah	879	-	-	163	395
Peralatan dan Mesin	31,719	21,083	14,450	22,175	40,164
Gedung dan Bangunan	12,813	10,535	19,868	11,175	16,830
Jalan, irigasi dan jaringan	45,144	68,315	31,772	47,158	66,665
Aset tetap lainnya	3,242	3,649	5,660	6,050	28,848
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
Aset lainnya	-	-	-	-	-
Belanja tidak terduga	186	25	8	1,110	-
Belanja tidak terduga	186	25	8	1,110	-
Transfer	601	20	-	716	-
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	601	-	-	716	-
Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa	-	20	-	-	-
Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa	-	-	-	-	-
Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa	-	-	-	-	-
Belanja dan Transfer	490,609	543,456	314,893	348,703	379,497
Pembiayaan	48,029	22,524	5,624	(43,234)	18,896
Penerimaan Pembiayaan	48,029	25,024	5,836	562	19,408
SiLPA TA sebelumnya	48,029	18,665	5,836	562	19,408
Pencairan dana cadangan	-	6,359	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	2,500	212	43,796	512
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	1,500	212	2,000	-
Pembayaran Pokok Utang	-	1,000	-	41,796	512
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-

Realisasi APBD Berdasarkan Permendagri Tahun 2010
(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Kab. Bengkulu Selatan
Pendapatan	394,968
PAD	11,894
Pajak daerah	2,169
Retribusi daerah	6,172
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1,680
Lain-lain PAD yang sah	1,873
Dana Perimbangan	341,656
DBH	20,192
DAU	285,482
DAK	35,982
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	41,418
Hibah	-
Dana darurat	-
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	8,718
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	18,970
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	13,730
Lain-lain	-
Belanja	396,438
Belanja Tidak Langsung	263,685
Belanja Pegawai	237,785
Belanja Bunga	-
Belanja Subsidi	-
Belanja Hibah	14,474
Belanja Bantuan sosial	8,514
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	-
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	1,402
Belanja tidak terduga	1,510
Belanja Langsung	132,753
Belanja Pegawai	25,239
Belanja Barang dan jasa	62,517
Belanja Modal	44,997
Pembiayaan Netto	26,872

Penerimaan Pembiayaan	28,060
SiLPA TA sebelumnya	27,904
Pencairan dana cadangan	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	155
Pengeluaran Pembiayaan	1,188
Pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-
Pembayaran Pokok Utang	1,188
Pemberian Pinjaman Daerah	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-

Realisasi APBD Berdasarkan SAP Tahun 2011
(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Kab. Bengkulu Selatan	Kab. Bengkulu Utara	Kab. Rejang Lebong	Kab. Kaur	Kab.Seluma	Kab. Mukomuko	Kab. Lebong	Kab Kepahiang	Kab. Bengkulu Tengah
	105	106	107	108	109	110	111	112	113
Pendapatan	473,978	658,968	558,241	365,413	443,437	418,639	386,300	415,929	391,166
PAD	14,758	19,099	19,851	6,811	5,536	9,341	7,790	11,990	3,867
Pajak daerah	2,756	4,353	4,187	1,264	2,822	2,820	1,601	2,287	1,175
Retribusi daerah	8,235	1,932	11,853	1,353	630	2,452	688	4,435	470
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1,923	2,009	1,663	2,123	1,120	1,853	2,123	2,603	69
Lain-lain PAD yang sah	1,845	10,806	2,149	2,070	963	2,217	3,378	2,665	2,153
Pendapatan Transfer	459,220	639,869	538,390	358,602	437,901	356,390	378,342	403,939	370,503
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	382,926	468,711	439,972	309,868	349,901	346,177	305,887	323,114	338,580
Dana Bagi Hasil Pajak	19,749	9,540	22,184	21,415	21,488	28,395	26,633	21,494	14,152
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	3,250	33,758	3,239	3,293	3,303	1,164	3,353	3,240	15,776
Dana alokasi umum	322,294	374,335	374,497	248,742	286,760	281,889	249,641	264,545	249,976
Dana alokasi khusus	37,633	51,079	40,053	36,417	38,351	34,729	26,260	33,835	58,676
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	67,011	156,993	87,933	41,363	77,492	-	65,118	71,768	24,301
Dana Otonomi Khusus	-	-	19,255	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	67,011	156,993	68,678	41,363	77,492	-	65,118	71,768	24,301
Transfer Pemerintah Provinsi	9,283	14,165	10,486	7,371	10,508	10,213	7,337	9,057	7,622
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9,283	14,165	10,486	7,371	10,508	10,213	7,337	9,057	7,622

Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan yang sah	-	-	-	-	-	52,907	169	-	16,796
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	52,907	169	-	16,796
Belanja	476,746	590,678	549,533	355,461	436,144	370,650	362,944	398,352	412,480
Belanja Operasi	399,315	465,110	451,173	273,998	295,519	294,830	269,092	277,694	290,338
Belanja Pegawai	298,439	335,187	317,492	180,929	227,099	210,362	169,304	186,234	177,377
Belanja Barang	79,555	99,464	85,081	64,732	48,707	57,597	86,631	74,250	72,954
Belanja Bunga	-	-	31	-	-	440	-	-	-
Belanja Subsidi	-	625	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	12,799	7,970	7,438	11,293	4,534	4,983	10,423	5,492	23,719
Belanja Bantuan sosial	7,519	7,751	14,822	1,889	3,521	5,034	2,733	1,117	7,500
Belanja Bantuan Keuangan	1,004	14,112	26,309	15,155	11,658	16,415	-	10,601	8,787
Belanja Modal	76,176	125,569	95,939	81,463	140,558	75,262	93,853	120,658	121,923
Tanah	-	31	2,234	158	7,999	388	3,001	467	3,865
Peralatan dan Mesin	39,989	26,171	12,897	20,082	12,405	28,273	19,182	21,218	42,690
Gedung dan Bangunan	11,643	16,115	14,976	16,367	21,201	19,267	16,531	22,137	36,390
Jalan, irigasi dan jaringan	19,038	79,235	61,987	44,249	93,504	23,584	54,435	68,782	35,826
Aset tetap lainnya	5,506	4,016	3,845	607	5,449	3,751	703	8,054	3,151
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja tidak terduga	1,255	-	2,421	-	66	557	-	-	220
Belanja tidak terduga	1,255	-	2,421	-	66	557	-	-	220
Transfer	-	445	-	-	-	734	-	-	114
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	-	445	-	-	-	734	-	-	114

Realisasi APBD Berdasarkan Permendagri Tahun 2011
(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Kota Bengkulu
	17
Pendapatan	611,815
PAD	39,318
Pajak daerah	22,608
Retribusi daerah	8,764
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1,909
Lain-lain PAD yang sah	6,036
Dana Perimbangan	456,091
DBH	31,066
DAU	397,655
DAK	27,371
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	116,406
Hibah	-
Dana darurat	-
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	17,413
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	98,993
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	-
Lain-lain	-
Belanja	595,219
Belanja Tidak Langsung	382,217
Belanja Pegawai	357,489
Belanja Bunga	-
Belanja Subsidi	-
Belanja Hibah	9,590
Belanja Bantuan sosial	8,345
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	27
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	6,466
Belanja tidak terduga	301
Belanja Langsung	213,001
Belanja Pegawai	28,745
Belanja Barang dan jasa	102,124
Belanja Modal	82,133
Pembiayaan Netto	2,239

Penerimaan Pembiayaan	14,739
SiLPA TA sebelumnya	14,739
Pencairan dana cadangan	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
Pengeluaran Pembiayaan	12,500
Pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	1,500
Pembayaran Pokok Utang	11,000
Pemberian Pinjaman Daerah	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-

Realisasi APBD Berdasarkan SAP Tahun 2012
(Dalam jutaan rupiah)

Uraian	Kab. Bengkulu Selatan	Kab. Bengkulu Utara	Kab. Rejang Lebong	Kota Bengkulu	Kab. Kaur	Kab. Seluma	Kab. Mukomuko	Kab. Lebong	Kab. Kepahiang	Kab. Bengkulu Tengah
	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
Pendapatan	560,561	636,580	630,816	677,219	430,697	486,402	463,290	402,267	427,421	404,009
PAD	18,911	24,694	47,172	41,710	7,782	10,721	9,218	7,749	13,896	5,743
Pajak daerah	3,281	4,610	5,282	29,103	2,294	3,395	3,278	1,876	2,433	1,757
Retribusi daerah	10,132	1,993	6,597	5,817	1,184	853	1,381	973	5,343	280
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1,161	100	1,310	1,299	1,483	678	1,121	1,284	1,583	173
Lain-lain PAD yang sah	4,337	17,992	33,982	5,489	2,821	5,795	3,438	3,615	4,537	3,533
Pendapatan Transfer	540,927	611,886	583,644	635,510	421,915	475,681	450,563	393,988	385,094	398,207
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	464,457	539,952	524,064	546,755	367,406	427,980	409,946	381,046	372,285	357,937
Dana Bagi Hasil Pajak	19,501	28,802	22,563	34,786	23,646	23,664	27,684	26,725	21,327	13,667
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	4,096	20,630	4,079	4,079	4,271	4,252	4,107	4,304	4,094	18,631
Dana alokasi umum	396,665	448,066	448,469	475,746	301,077	349,783	338,203	312,274	317,103	288,875
Dana alokasi khusus	44,195	42,454	48,953	32,144	38,413	50,281	39,952	37,744	29,762	36,764
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	62,582	49,271	43,935	57,933	44,410	28,920	-	3,114	-	30,538
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500
Dana Penyesuaian	62,582	49,271	43,935	57,933	44,410	28,920	-	3,114	-	22,038
Transfer Pemerintah Provinsi	13,888	22,663	15,645	30,822	10,098	18,782	40,617	9,828	12,809	9,732
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	13,888	22,663	15,645	30,822	10,098	18,782	14,693	9,828	12,809	9,732
Lainnya	-	-	-	-	-	-	25,924	-	-	-

Realisasi APBD Berdasarkan SAP Tahun 2013
(Dalam jutaan rupiah)

Uraian	Kab. Bengkulu Selatan	Kab. Bengkulu Utara	Kota Bengkulu	Kab. Kaur	Kab. Seluma	Kab. Lebong	Kab. Kepahiang	Kab. Bengkulu Tengah
	88	89	90	91	92	93	94	95
Pendapatan	608,059	689,469	793,506	461,125	558,013	457,735	492,415	477,511
PAD	25,454	30,114	55,980	10,339	16,757	12,829	19,468	8,757
Pajak daerah	4,371	5,480	34,543	2,390	6,276	2,493	2,741	3,826
Retribusi daerah	11,940	2,281	10,408	2,655	816	969	1,619	1,157
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1,868	-	2,216	2,491	1,343	2,699	2,532	279
Lain-lain PAD yang sah	7,276	22,353	8,813	2,803	8,322	6,668	12,576	3,495
Pendapatan Transfer	578,723	659,355	732,376	449,785	541,256	444,449	472,947	464,780
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	512,273	575,282	613,982	411,348	481,536	410,865	427,971	424,597
Dana Bagi Hasil Pajak	17,690	24,905	27,787	21,004	21,425	20,915	17,287	14,814
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	4,045	20,472	4,032	4,201	4,737	4,335	3,989	18,155
Dana Alokasi Umum	444,046	483,142	537,904	329,881	397,769	332,488	357,903	330,694
Dana Alokasi Khusus								
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	56,438	67,463	89,041	29,334	41,191	25,160	33,492	31,901
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	56,438	67,463	89,041	29,334	41,191	25,160	33,492	31,901
Transfer Pemerintah Provinsi	10,012	16,609	29,353	9,103	18,529	8,424	11,484	8,281
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	10,012	16,609	-	9,103	18,529	8,424	11,484	8,281
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	29,353	-	-	-	-	-

Lain-lain Pendapatan yang sah	3,882	-	5,150	1,000	-	458	-	3,974
Pendapatan Hibah	95	-	-	1,000	-	-	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	3,787	-	5,150	-	-	458	-	3,974
Belanja	585,482	690,782	756,907	467,214	548,166	453,004	462,748	478,890
Belanja Operasi	492,691	561,696	632,630	360,826	407,177	340,868	324,669	363,602
Belanja Pegawai	376,354	421,904	491,235	212,304	296,017	225,059	228,995	246,273
Belanja Barang	107,495	117,873	131,390	125,421	96,442	101,685	77,217	95,869
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	5,665
Belanja Subsidi	-	483	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	1,806	5,912	6,200	824	9,965	1,357	2,591	-
Belanja Bantuan sosial	3,667	3,440	3,005	-	2,804	5,817	2,633	1,215
Belanja Bantuan Keuangan	3,370	12,084	800	22,277	1,948	6,950	13,233	14,580
Belanja Modal	92,770	129,086	124,277	106,388	139,750	111,140	137,905	113,170
Tanah	6,362	-	800	1,934	5,231	1,514	2,329	1,191
Peralatan dan Mesin	18,421	15,774	39,153	24,657	49,912	20,533	23,101	18,904
Gedung dan Bangunan	28,375	35,646	22,407	41,130	29,402	42,447	42,779	44,982
Jalan, irigasi dan jaringan	37,054	73,871	59,368	37,278	51,965	46,114	64,141	47,713
Aset tetap lainnya	2,558	3,795	2,550	1,388	3,240	533	5,556	380
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja tidak terduga	21	-	-	-	1,238	996	174	2,118
Belanja tidak terduga	21	-	-	-	1,238	996	174	2,118
Transfer	-	707	19	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	-	707	-	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa	-	-	19	-	-	-	-	-

Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja dan Transfer	585,482	691,489	756,927	467,214	548,166	453,004	462,748	478,890
Pembiayaan	34,593	66,001	16,615	-	93,332	35,488	43,575	13,656
Penerimaan Pembiayaan	37,493	67,001	36,264	-	94,332	35,782	46,957	16,654
SILPA TA sebelumnya	37,493	67,001	36,264	-	94,332	35,782	46,957	16,654
Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	2,900	1,000	19,649	-	1,000	294	3,382	2,998
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	1,500	1,000	15,149	-	1,000	-	1,000	1,000
Pembayaran Pokok Utang	1,400	-	4,500	-	-	294	2,382	998
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	1,000
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-

Realisasi APBD Berdasarkan Permendagri Tahun 2013
(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Kab. Mukomuko
	31
Pendapatan	562,938
PAD	20,184
Pajak daerah	5,878
Retribusi daerah	1,470
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2,140
Lain-lain PAD yang sah	10,696
Dana Perimbangan	495,654
DBH	30,354
DAU	404,398
DAK	60,901
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	47,100
Hibah	-
Dana Darurat	-
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	-
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	-
Lain-lain	47,100
Belanja	577,069
Belanja Tidak Langsung	242,788
Belanja Pegawai	213,042
Belanja Bunga	3,006
Belanja Subsidi	-
Belanja Hibah	2,400
Belanja Bantuan sosial	42
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	-
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	21,397
Belanja tidak terduga	2,901
Belanja Langsung	334,281
Belanja Pegawai	75,223
Belanja Barang dan jasa	106,876
Belanja Modal	152,183

Pembiayaan Netto	51,552
Penerimaan Pembiayaan	76,148
SiLPA TA sebelumnya	39,193
Pencairan dana cadangan	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	36,955
Pengeluaran Pembiayaan	24,596
Pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	3,000
Pembayaran Pokok Utang	21,468
Pemberian Pinjaman Daerah	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	128

Realisasi APBD Berdasarkan SAP Tahun 2014
(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Kab. Bengkulu Selatan	Kab. Bengkulu Utara	Kota Bengkulu	Kab. Kaur	Kab. Seluma	Kab. Lebong	Kab. Kepahiang	Kab. Bengkulu Tengah
Pendapatan	701,659	798,663	937,898	540,040	637,049	529,389	584,294	574,538
Pendapatan Asli Daerah	40,101	51,659	81,755	19,493	25,608	17,498	28,184	16,478
Pajak daerah	5,046	6,565	50,247	4,252	6,431	3,989	3,747	5,850
Retribusi daerah	23,195	2,056	11,559	5,774	2,057	1,050	1,310	1,863
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3,437	2,580	3,573	3,423	1,912	4,579	3,830	868
Lain-lain PAD yang sah	8,423	40,458	16,375	6,044	15,208	7,880	19,297	7,896
Pendapatan Transfer	659,559	747,004	843,444	520,047	611,441	509,118	546,454	552,346
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	562,436	636,374	675,684	466,721	537,707	458,290	483,756	490,477
Dana Bagi Hasil Pajak	12,204	19,895	24,351	13,920	15,150	14,179	12,776	11,186
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	10,295	46,041	9,941	11,490	12,000	10,400	9,941	47,039
Dana Alokasi Umum	490,437	512,860	602,742	371,883	444,699	373,700	402,022	379,670
Dana Alokasi Khusus	49,500	57,579	38,650	69,428	65,858	60,011	59,017	52,582
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	76,119	84,091	123,462	40,846	51,857	36,744	46,956	47,737
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	76,119	84,091	123,462	40,846	51,857	36,744	46,956	47,737
Transfer Pemerintah Provinsi	21,004	26,538	44,298	12,480	21,877	14,084	15,742	14,133
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	21,004	26,538	44,298	12,480	21,877	14,084	15,742	14,133
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan yang sah	2,000	-	12,700	500	-	2,773	9,656	5,714
Pendapatan Hibah	-	-	12,700	500	-	-	9,656	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	2,000	-	-	-	-	2,773	-	5,714
Belanja	696,503	747,999	882,491	534,128	679,385	529,957	553,601	538,114
Belanja Operasi	569,923	615,687	727,533	396,116	464,723	372,165	389,491	416,240

Belanja Pegawai	425,086	449,333	571,223	227,073	316,980	231,571	256,401	270,765
Belanja Barang	122,152	137,194	143,753	140,951	140,793	100,995	101,704	117,596
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	683	200	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	14,200	10,998	10,826	3,322	1,180	17,376	7,156	2,645
Belanja Bantuan Sosial	4,412	3,460	1,000	-	4,249	4,356	2,292	9,594
Belanja Bantuan Keuangan	3,390	14,502	731	24,770	1,520	17,866	21,938	15,641
Belanja Modal	126,379	132,312	154,957	138,012	213,413	157,791	164,053	120,178
Tanah	7,882	254	-	630	3,491	1,278	7,197	2,600
Peralatan dan Mesin	20,933	18,174	36,991	25,208	33,291	27,788	25,172	17,464
Gedung dan Bangunan	28,903	32,377	23,181	49,899	29,831	35,272	41,375	52,113
Jalan, irigasi dan jaringan	65,972	81,029	94,093	61,849	139,851	92,834	89,489	47,214
Aset tetap lainnya	2,689	478	693	427	6,949	619	820	788
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	200	-	-	-	1,249	-	57	1,697
Belanja Tidak Terduga	200	-	-	-	1,249	-	57	1,697
Transfer	-	1,145	21	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	-	1,145	-	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa	-	-	21	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja dan Transfer	696,503	749,144	882,512	534,128	679,385	529,957	553,601	538,114
Pembiayaan	55,670	62,874	50,731	21,238	98,169	45,593	55,999	9,853
Penerimaan Pembiayaan	57,170	63,981	53,194	21,238	103,169	46,593	72,963	12,276
SiLPA TA sebelumnya	57,170	63,981	53,194	21,238	103,169	46,593	72,963	12,276
Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-

Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	1,500	1,108	2,463	0	5,000	1,000	16,964	2,423
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	1,500	1,000	-	-	5,000	1,000	13,656	1,861
Pembayaran Pokok Utang	-	-	2,463	-	-	-	3,308	563
Pemberian Pinjaman Daerah	-	108	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	0	-	-	-	-

Realisasi APBD Berdasarkan Permendagri Tahun 2014
(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Kab. Mukomuko
Pendapatan	655,994
PAD	34,893
Pajak daerah	5,877
Retribusi daerah	2,140
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3,230
Lain-lain PAD yang sah	23,645
Daper	550,644
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	30,268
Dana Alokasi Umum	454,993
Dana Alokasi Khusus	65,382
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	70,457
Hibah	-
Dana darurat	-
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	21,572
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	48,385
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	500
Lain-lain	-
Belanja	609,329
Belanja Tidak Langsung	263,557
Belanja Pegawai	237,036
Belanja Bunga	2,053
Belanja Subsidi	-
Belanja Hibah	2,910
Belanja Bantuan Sosial	59
Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	35
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	21,032
Belanja Tidak Terduga	432
Belanja Langsung	345,772
Belanja Pegawai	65,344
Belanja Barang dan jasa	134,412
Belanja Modal	146,016
Pembiayaan	37,085
Penerimaan	81,287

SILPA TA sebelumnya	37,421
Pencairan dana cadangan	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	43,867
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
Pengeluaran	44,202
Pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-
Pembayaran Pokok Utang	44,202
Pemberian Pinjaman Daerah	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-

